

## DAFTAR PUSTAKA

- Algemene Voorwaarden voor de uitvoering bij Aanneming van Openbare Werken (AV 1941). (1941). *Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia*. Diterjemahkan oleh Badan Penerbit Pekerjaan Umum, Juni 1978.
- Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2011). *SNI 7033:2011 – Tata Cara Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu pada Proyek Konstruksi*. Jakarta: BSN
- Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2002). *SNI 7394:2002: Prosedur Pengecoran Beton*. Jakarta: BSN.
- Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2004). *SNI 03-1733-2004: Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan*. Jakarta: BSN.
- Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2011). *SNI 7033:2011: Tata Cara Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu pada Proyek Konstruksi*. Jakarta: BSN.
- Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2013). *SNI 1726:2019: Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung*. Jakarta: BSN.
- Badan Standardisasi Nasional (BSN). (1992). *SNI 03-2847-1992: Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung*. Jakarta: BSN
- Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2018). *SNI ISO 45001:2018: Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) – Persyaratan dan Panduan Penggunaan*. Jakarta: BSN.
- Departemen Pekerjaan Umum (1961). *NI-5: Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PPKI 1961)*. Jakarta: Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan.
- Departemen Pekerjaan Umum (1971). *Peraturan Beton Indonesia (PBI 1971) – NI 2*. Jakarta: Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan.
- Departemen Pekerjaan Umum (1974). *NI-8: Peraturan Semen Portland Indonesia*. Jakarta: Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan.
- Departemen Pekerjaan Umum (1983). *Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung (PPI-1983)*. Jakarta: Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan.
- Departemen Pekerjaan Umum (1983). *Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk Gedung (PPTGI-1983)*. Jakarta: Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan.
- Departemen Pekerjaan Umum (1984). *Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia (PPBBI-1984)*. Jakarta: Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan.
- Departemen Perindustrian (1980). *SII-0297-80: Baja Karbon Cor – Mutu dan Cara Uji*. Jakarta: Departemen Perindustrian Republik Indonesia.

- Departemen Perindustrian (tanpa tahun). *NI-10: Bata Merah sebagai Bahan Bangunan*. Jakarta: Departemen Perindustrian Republik Indonesia.
- Green Building Council Indonesia (GBCI). (2021). *GreenShip for New Building v1.2*. Jakarta: GBCI.
- International Organization for Standardization (ISO). (2015). *ISO 9001:2015 – Quality management systems – Requirements*. Geneva: ISO
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Lingkungan Kerja*. Jakarta: Kemnaker RI.
- Kementerian Pekerjaan Umum (2008). *Permen PU Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). (2019). *Pedoman Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2006). *Permen PUPR No. 29/PRT/M/2006: Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi*. Jakarta: Kementerian PUPR
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). (2020). *Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar Kegiatan dan Tolok Ukur Kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Jakarta: KemenPUPR.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). (2021). *Permen PUPR No. 9 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pekerjaan Konstruksi*. Jakarta: KemenPUPR.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). (2021). *Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)*. Jakarta: KemenPUPR.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). *Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung Jabatan Kerja Juru Gambar Bangunan Gedung*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (1978). *Peraturan Umum Instalasi Listrik Indonesia (PUIL 1977)*. Jakarta: LIPI
- Omar, O. (2018). 'Intelligent Building: Definitions, Factors and Evaluation Criteria of Selection', *Alexandria Engineering Journal*, 57(4), pp. 2903–2910.

Pemerintah Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung*. Jakarta: Sekretariat Negara.

